



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN,  
PENDAPATAN PERKAPITA DAN KETIMPANGAN  
PENDAPATAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DI SUMATERA BARAT**

Oleh :

**Nova Mulyati**


**06 151 059**

**Mahasiswa program S-1  
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Guna memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**PADANG**

**2010**

	No. Alumni Universitas	<b>NOVA MULYATI</b>	No. Alumni Fakultas
	<b>BIODATA</b>		
a) Tempat/tanggal lahir : Padang / 21 November 1987    b) Nama Orang Tua : Abdul Aziz & Marnis    c) Fakultas : Ekonomi    d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) NO BP : 06151059    f) Tanggal Lulus : 27 Agustus 2010    g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan    h) IPK : 3,41    i) Lama Studi : 4 Tahun    h) Alamat Orang Tua : Jln. Balai Baru No.22 RT 01/05 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Padang			

**Analisis Pengaruh Reformasi Perpajakan, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Penerimaan Pajak di Sumatera Barat**



Skripsi S1 oleh: Nova Mulyati  
Pembimbing Skripsi: Drs. Zulkamaini Ras, M.Si

**Abstrak**

Skripsi ini membahas tentang pengaruh reformasi perpajakan, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan terhadap penerimaan pajak di Sumatera Barat periode 1979 hingga 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh reformasi perpajakan, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan terhadap penerimaan pajak di Sumatera Barat. metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode OLS (Ordinary Least Square), yakni analisis regresi dummy untuk melihat bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penerimaan pajak. Data yang digunakan adalah data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel Independent yang diteliti yaitu pendapatan perkapita, ketimpangan pendapatan dan reformasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif terhadap penerimaan pajak di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Sumbar perlu meningkatkan pendapatan perkapita melalui upaya peningkatan PDRB. Selain itu, Pemda juga perlu memperhatikan ketimpangan pendapatan melalui upaya peningkatan pendapatan Rill masyarakat terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah juga perlu menyadari bahwa reformasi perpajakan telah meningkatkan penerimaan pajak di Sumbar, oleh karena itu pemda Sumbar perlu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan pajak yang sudah dicapai selama ini.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 27 Agustus 2010

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1. 	2.	3. 
Nama Terang	Drs. Zulkamaini Ras, M.Si ( Pembimbing )	Drs. Abdul Karib, M.Si ( Pembahas I )	Sri Maryati, SE, M.Si ( Pembahas II )

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

**Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing**

NIP. 130 812 952

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1966, pemerintahan Orde Baru telah membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administratif. Dengan berbagai keputusan ekonomi yang terpusat melalui bermacam-macam Inpres, Keppres dan peraturan pemerintah, pemerintah pusat menyedot berbagai macam hasil kekayaan alam dan pendapatan asli dari daerah ke pusat.

Struktur pemerintahan terpusat telah mengakibatkan kesenjangan regional antara Jakarta atau Jawa dengan luar Jawa, maupun antara kawasan timur Indonesia dengan kawasan barat Indonesia (Mudrajad, 2004). Sehingga banyak propinsi yang kaya akan sumber daya alam menyatakan ketidakpuasan akan hasil eksploitasi sumber daya alamnya yang sebagian besar digunakan oleh pemerintah pusat. Rasa sentimen yang muncul dari daerah terhadap pusat, memicu terjadinya pemberontakan dari Propinsi yang kaya akan sumber daya alam dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional, namun tidak memperoleh manfaat yang sebanding.

Puncak dari Sentralisme kekuasaan di Indonesia, termasuk kekuasaan dalam membuat keputusan ekonomi adalah runtuhnya ekonomi Indonesia yang ditandai dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997.

Proses berbasis kedaerahan yang terjadi pada penghujung 1998 secara tegas mengindikasikan ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralisasi pemerintah dan keuangan sebagai pemicu utamanya (Pratikno, 1999).

Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Soeharto mendapat tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada pilihan untuk melakukan pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah. Setelah menjabat kurang dari satu tahun presiden Habibie mulai membuat perombakan di segala bidang seperti halnya memberlakukan dasar hukum desentralisasi, yaitu mengeluarkan UU No 22/1999 mengenai pemerintah daerah dan UU No 25/1999 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. UU No 22/1999 mendelegasikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah daerah dan membentuk proses politik daerah. Sedangkan UU No 25/1999 mendorong desentralisasi dengan memberikan pembagian sumber daya fiskal kepada pemerintah daerah.

Dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tersebut, maka struktur pemerintahan dan desentralisasi fiskal mengubah drastis pola hubungan pusat dan daerah (Ma & Hofman, 2002; Mudrajat, 2004). Hal ini berarti daerah-daerah yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunannya masing-masing tanpa mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat lagi. Hal ini yang sering disebut peralihan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Dimana peralihan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri dan meningkatkan pendapatan daerahnya.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Penerimaan pajak di Sumatera Barat selama periode 1979-2008 secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahun. Sampai dengan tahun 2008, penerimaan pajak daerah Propinsi Sumatera Barat masih di dominasi oleh pajak atas kendaraan bermotor yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dengan kontribusi untuk ketiga jenis pajak tersebut terhadap total penerimaan pajak daerah adalah sekitar 96,79% pertahun.

Berdasarkan hasil empiris dari analisa yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat yang mana disini adalah penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Perkapita ( $X_1$ ) memiliki hubungan positif dengan penerimaan pajak di Sumatera Barat. Jika diasumsikan pendapatan perkapita meningkat 1 persen dengan asumsi *ceteris paribus* maka penerimaan pajak meningkat sebesar 1,85 persen.
2. Variabel tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan ( $X_2$ ) memiliki hubungan positif dengan penerimaan pajak di Sumatera Barat. Hal ini berlawanan dengan teori dan hipotesa pada bab I. Dimana teori dan hipotesa menyebutkan bahwa tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmy Asmuri, 2005. *Pengaruh reformasi perpajakan terhadap penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan), Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia .
- Bohari, 2004. *Pengantar hukum pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Depdagri, 2001. *Refisi UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah*, Jakarta : Depdagri
- Depkeu RI, 2008. *Pelengkap Buku pegangan 2008 Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Depkeu RI
- Harry T. Oshima & Bruno Barros, 1989. *Trend in growth and distribution of income in selection asian countries*, The Philippine Economic Jurnal.
- Harun Hamroli, 1990. *Penuntun Analisis Peningkatan Dana Pembangunan Kota*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Haw Widjaja, 2007. *Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia: dalam rangka sosialisasi UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Ichimura, 1989. *Pembangunan Ekonomi Indonesia, Masalah Dan Analisis*, Jakarta : UI-Press
- Iswardono, 1992. *Usaha peningkatan PAD Kotamadya yogyakarta*, Yogyakarta : BPFE.
- Lincoln Arsyad, 1999. dalam buku Mudrajat, 2004; *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Erlangga
- Ma & Hofman, 2002. dalam buku Mudrajat, 2004; *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Erlangga